

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Sumber Lain

- Andy P. Hamzah & Nur Aisyah Kustiani. (2014). *Buku Seri Akuntansi Pemerintah Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah (Buku 1)*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2021*.
- Bambang Pamungkas dkk. (2011). Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN) Kaitannya Dalam Pencatatan Nilai Aset Tetap Pemerintah.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta.
- Fresly Kornelius Engka dkk. (2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Profil KPPN Mojokerto*. Diakses tanggal 19 Desember 2021, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/profil/114-profil.html>
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (n.d.). *Sejarah KPPN Mojokerto*. Diakses tanggal 27 Februari 2022, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/profil/sejarah.html>
- KPPN Mojokerto . (2020). *Laporan Barang Milik Negara KPPN Mojokerto Tahun 2020*.
- KPPN Mojokerto. (2020). *Laporan Keuangan KPPN Mojokerto Tahun 2020*.
- KPPN Mojokerto. (2021). *Laporan Kinerja (Lakin) KPPN Mojokerto Tahun 2021*.
- Ni'matuzahroh & Susanti Prasetyaningrum. (2018). *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*.
- Santosa, F. P. (2021). *Tinjauan Akuntansi Aset Tetap di KPPN Bondowoso Tahun Anggaran 2018-2019*.
- Sherly Pinatik dkk. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Kota Manado.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2013). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.*
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2014). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.*